

ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilangsungkan mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, istri, dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, berakibat juga pada kedudukan anak serta harta bersama dalam perkawinan. Dalam nikah siri semua akibat hukum dari perkawinan yang sah sulit untuk dijalankan sebab pernikahan yang dilangsungkan tidak dicatatkan secara hukum.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada istri, anak dan harta kekayaan dari pernikahan siri serta menganalisis akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian normatif dan dilakukan dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri haknya sama seperti anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang dicatatkan. Bila pernikahan siri diisbatkan kepada pihak Pengadilan Agama hak-hak sebagai istri serta harta kekayaan dalam pernikahan mendapatkan perlindungan secara hukum. Akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini tidak dianggap sah menurut Undang-Undang namun masih tetap mendapatkan perlindungan dari orang tuanya dan masih berhak mendapatkan pelayanan pendidikan seperti anak-anak yang lain. Kedudukan istri menurut hukum islam ialah sama dengan perkawinan yang dicatatkan akan tetapi lemah dalam hukum negara, tidak adanya pengakuan, hak sebagai istri juga sulit terpenuhi. Pembagian harta benda dalam perkawinan hanya didasarkan pada hukum Islam, karena perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hubungan perdata terhadap ayah biologisnya, bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain sehingga perlindungan dan akibat hukum anak yang lahir dari pernikahan siri dapat terpenuhi.

Kata kunci : Nikah Siri, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Istri, Anak, Harta Kekayaan

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 2 explains that marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief and each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations. The marriage that takes place has legal consequences for the position of the husband and wife, which places the rights and obligations for husband and wife, and also affects the position of children and joint property in marriage. In an unregistered marriage, all the legal consequences of a legal marriage are difficult to carry out because the marriage that is held is not legally registered.

The formulation of the problem from this research is how the legal consequences of unregistered marriage on the position of the wife, children and assets according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. The objectives to be achieved in this study are to analyze the legal protection given to wives, children and assets from unregistered marriages and to analyze the legal consequences of unregistered marriages on the position of wives, children and assets according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. The method that the researcher uses is a normative research method and is carried out with a statutory approach. The statutory approach is carried out by examining the legislation related to the legal issues under study.

The results of the study show that legal protection for children born in unregistered marriages has the same rights as children born in registered marriages. If a siri marriage is attributed to the Religious Courts, the rights as a wife and property in the marriage get legal protection. The legal consequences for children born from unregistered marriages are not considered legal according to the law, but they still get protection from their parents and are still entitled to educational services like other children. The position of the wife according to Islamic law is the same as a registered marriage but is weak in state law, there is no recognition, the rights as a wife are also difficult to fulfill. The division of property in marriage is only based on Islamic law, because marriages are carried out only based on religious law without being subject to the regulations of Law no. 1 of 1974. In the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 that children born from unregistered marriages have a civil relationship with their biological father, if it can be proven based on science and technology and/or other evidence so that the protection and legal consequences of children born from unregistered marriages can be fulfilled.

Keywords: Siri Marriage, Legal Protection, Legal Consequences, Wife, Children, Wealth